

Suara Senyap Perempuan di Jalur Arang

Ka'batl

Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

Email: kabati@uinib.ac.id

Abstract

The Minangkabau matrilineal system places women as owners of inherited land. In 1872, the Dutch colonial government began opening the Baro railway line from Sawahlunto to Teluk Bayur. This development process will definitely involve land owned by women. This article begins with the question of how negotiations are carried out with women regarding their rights. The research was conducted using a qualitative descriptive method with a feminist perspective with the assumption that women were marginalized from history because their stories were considered unimportant. The results of the exploration of the views and imaginations remaining in women's minds show that men dominate (niniak mamak) over women in the negotiation room. This domination is possible because women represent their voices in negotiating and deciding matters to men in the hope that men will defend their interests. On the other hand, men were also faced with a new, more individual worldview introduced by the colonialists so that they could no longer uphold the interests of their people.

Keywords: matrilineal, world view, representasi, imajinasi, eksplorasi, kolonial

Abstrak

Sistem matrilineal Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pemilik tanah pusaka. Pada tahun 1872, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka jalur kereta api *baro* dari Sawahlunto menuju Teluk Bayur. Proses pembangunan ini, pasti menempuh tanah-tanah milik kaum perempuan. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan bagaimana negosiasi-negosiasi dilakukan dengan perempuan berkaitan dengan hak mereka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berperspektif feminis dengan asumsi bahwa perempuan terpinggirkan dari sejarah karena kisahnya tidak dianggap penting. Hasil eksplorasi terhadap pandangan dan imajinasi yang tersisa dalam pikiran kaum perempuan ini menunjukkan bahwa terjadi dominasi oleh laki-laki (niniak mamak) terhadap perempuan di ruang negosiasi. Dominasi ini dimungkinkan karena perempuan mewakili (representasi) suaranya dalam berunding dan memutuskan satu perkara kepada laki-laki dengan harapan laki-laki akan membela kepentingan mereka. Di sisi lain, laki-laki juga dihadapkan pada pandangan dunia (*world view*) baru yang lebih individual diperkenalkan oleh kaum kolonial sehingga mereka tidak bisa lagi sepenuhnya menegakkan kepentingan kaumnya.

Kata Kunci: matrilineal, pandangan dunia, representasi, imajinasi, ekplorasi, kolonial

Pendahuluan

Pertengahan abad 19, Belanda berhasil menguasai Minangkabau. Eksploitasi besar-besaran di bidang ekonomi dengan dibukanya tambang batu bara Ombilin berikut infrastruktur pendukungnya berupa jalur kereta api, stasiun serta pelabuhan samudra, membuktikan bahwa kekuasaan kolonial tidak bisa dibendung. Eksploitasi ini juga membawa perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan ekonomi, terutama dengan terbukanya lapangan kerja baru di kampung-kampung di sepanjang jalur jalan kereta api, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap sistem adat mereka. Sistem yang sebelumnya seolah sudah mutlak, yaitu perempuan duduk sebagai pemilik harta pusaka (*mande sako*) kemudian dipaksa untuk mewakilkan (merepresentasikan) suaranya kepada laki-laki untuk bernegosiasi dengan Belanda perkara tanah pusaka mereka yang dipakai untuk kepentingan eksploitasi ini.

Cara pandang patriarki yang menempatkan perempuan seolah-olah tidak punya kemampuan bernegosiasi dan tidak pantas hadir di ruang-ruang publik membuat bandul otoritas perempuan dalam sistem matrilineal berubah arah. Kaum laki-laki yang dipercaya sebagai representasi perempuan dan diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan kaumnya mulai bertindak sebaliknya ketika berhadapan dengan tekanan kolonial. Akibatnya, perempuan mengalami tekanan berlapis, baik dari laki-laki di kaumnya maupun dari hegemoni kaum kolonial.

Di sisi lain, pembangunan dan eksplorasi yang dilakukan oleh bangsa kolonial di tengah masyarakat Minangkabau yang basis sistem sosialnya adalah komunal juga menimbulkan perubahan cara pandang (*world view*) masyarakat, khususnya laki-laki. Mereka yang sebelumnya bertanggungjawab penuh sebagai pelindung kaumnya kemudian dihadapkan pada kondisi baru (*new world view*) yang membuatnya harus bersikap lebih individual dan memikirkan diri sendiri serta mengutamakan keluarga 'kecil' atau keluarga 'batih' saja .

Konsep famili bagi kaum kolonial memang jauh berbeda dengan konsep famili yang ada dalam pandangan dunia lama (*old world view*) orang Minang. Bagi masyarakat Minangkabau, famili itu adalah keluarga besar tempat dia dilahirkan dan tempat nanti dia akan dikuburkan. Keluarga besarlah yang menjadi faktor primer dan penentu

sementara keluarga *batih* yang terbentuk karena proses pernikahan hanyalah sekunder. Oleh karena itu, mereka mengenal kata berkaum, bersuku be-rumah gadang, bertepian tempat mandi. Sementara kolonial yang datang bersamaan dengan semangat modernisasi dan kapitalisme memiliki pandangan bahwa famili terbangun atas dasar pernikahan dan skopnya kecil (individual). Keluarga batih inilah yang menjadi faktor primer dan sebaliknya keluarga besar (kaum) menjadi faktor sekunder. Dalam struktur yang berubah ini, budaya patriarkis sangat mungkin berkembang. Ayah sebagai keluarga dan istri serta anak-anak sebagai pelengkap yang mendukung tegaknya keluarga kecil yang harmonis.

Keberadaan perempuan sering kali tidak dianggap penting dalam budaya patriarkis, termasuk di era kolonial. Sejauh tidak mengganggu proses eksploitasi di negara jajahannya, isu-isu perempuan tidak diberi nama dan tidak menarik untuk diangkat sebagai diskursus. Persoalannya menjadi berbeda ketika kerja eksploitasi dilakukan oleh Belanda di wilayah barat (*sumatra westkust*) yang masyarakatnya menganut sistem matrilineal. Dalam sistem Matrilineal, sebuah sistem sosial yang hidup dalam masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, perempuan adalah pemilik tanah pusaka. Itu artinya seluruh pembangunan infrastruktur yang dilakukan di wilayah ini pasti berkaitan dengan hak kepemilikan perempuan, terutama tanah. Ketika pemerintah kolonial Belanda membuka jalur kereta api dari Sawahlunto menuju Teluk Bayur, pasti menempuh tanah-tanah milik kaum perempuan ini. Namun, persoalan kehadiran perempuan yang direpresentasikan oleh ninik mamak dan penghulu (laki-laki) dalam bernegosiasi dengan pihak kolonial memunculkan dilema keterpinggiran perempuan.

Dalam kajian feminis postkolonial kondisi pada saat terpinggirnya perempuan dari ruang-ruang publik ini memunculkan dilema keterjajahan (subaltern). Kelompok subaltern adalah kelompok yang suaranya selalu direpresentasikan, sementara representasi hanyalah alat untuk menuju dominasi nyata. Oleh karena itu, masyarakat yang tertekan dan terjajah, harus berbicara, harus mengambil inisiatif, dan menggelar aksi atas suara mereka yang terbungkam. Karena kekuasaan kolonial terus dipertahankan dalam dan melalui *discourse* (wacana) yang berbeda-beda.

Salah seorang feminis poskolonial yang pikiran kritisnya banyak ‘mengganggu’ bangsa kolonial dan kaum patriarki adalah Gayatri Spivak. Sebagai seorang kritikus

feminis, Spivak konsisten dengan pilihannya untuk menantang pemikiran kontemporer Barat. Upaya itu dia lakukan dengan menunjukkan betapa wacana-wacana dan praktik-praktik kelembagaan dan budaya dominan telah secara konsisten mengecualikan dan meminggirkan kaum jelata (subaltern), terutama perempuan subaltern. Fokusnya pada sejarah perempuan subaltern dan kritiknya terhadap proyek subaltern telah secara radikal menantang cara identitas politik dikonseptualisasikan dalam banyak pemikiran kontemporer. Spivak mengklaim bahwa kelompok subaltern tidak bisa bicara dikarenakan mereka tidak punya sejarah.¹ Karena itu kemudian dia mendorong penekannya pada kemampuan kaum subaltern untuk berbicara.² Pada titik inilah kemudian gagasan Spivak dianggap penting dalam gerakan perubahan di negara-negara terjajah dan juga bagi kelompok-kelompok yang terhegemoni pada lapisan-lapisan bawah kekuasaan.

Selanjutnya, dalam tulisan ini akan coba dilakukan eksplorasi memori kolektif perempuan, terutama kaitannya dengan pengalaman mereka dalam memaknai hak pewarisan tanah dan kaitannya dengan keberadaan tambang batu bara serta infrastruktur pendukung berupa jalur kereta bara antara Sawahlunto dan Teluk Bayur, Padang. Fokus utama tulisan adalah memahami narasi perempuan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perjalanan *baro* ini, yang secara historis menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial Sumatera Barat. Ini merupakan upaya mengangkat suara perempuan, mengeksplorasi pengalaman mereka, dan memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih dalam terhadap kontribusi perempuan dalam membangun identitas sosial dan budaya di sekitar jalur kereta bara antara Sawahlunto dan Teluk Bayur, Padang sehingga diharapkan dapat melepaskan perempuan itu dari tekanan hegemonik yang terus terwariskan dari era kolonial sampai hari ini.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan perspektif feminis dengan menggunakan metode deskriptif. Penyajian

¹ Riach, Graham K. 2017. *An Analysis of Gayatri Chakravorty Spivak's: Can The Subaltern Speak?*. Roudledge. London

² Suryawati, Indah (dkk), 2018. Third World Subaltern Women in the Review of Feminism Theory Postcolonial Gayatri Chakravorty Spivak, <https://journal.neoelectura.com/index.php/focus/article/view/336/251>

data mengenai situasi, penataan hubungan maupun jalinan cerita dari narasumber satu ke narasumber lainnya dapat disajikan secara lebih spesifik.³ Perspektif feminis dalam penelitian ini dihadirkan dengan kesadaran penuh bahwa perempuan adalah sumber tulisan utama. Jadi, perempuan di sini didengarkan suaranya, dipahami pandangan-pandangannya dan diberi tempat untuk menyampaikan apapun tanpa harus dikategorikan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah data yang penting atau tidak penting. Dengan demikian, data primer penelitian ini diambil dari hasil wawancara mendalam dengan perempuan yang memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas seputar jalur kereta bara, terutama yang tinggal dan banyak beraktivitas di seputar Stasiun Simpang Haru, Stasiun Lubuk Alung, Stasiun Kayu Tanam, Stasiun Padang Panjang, Stasiun Batu Taba, dan Pasar Pitalah Bungo Tanjung (Pita Bunga). Data primer ini diperkuat dengan data sekunder lewat pencarian narasi dan memori dari sumber-sumber arsip dan dokumentasi sejarah.

Pendekatan deskriptif kualitatif berperspektif feminis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi ruang bicara serta sebuah upaya merekonstruksi dan memahami pengalaman perempuan dalam konteks dirinya sebagai pemilik tanah dan bangunan pemikiran (*new world view*) yang terbentuk dari proses perjalanan kereta *baro*, baik sebagai penumpang, keluarga yang terlibat, atau pekerja di sekitar jalur kereta. Hasil penelitian menyoroti peran yang beragam dan kompleks dari perempuan dalam membangun memori kolektif terkait dengan jalur kereta bara ini. Memori-memori ini mencakup pengalaman sehari-hari, cerita keberanian, pengorbanan, dan peran sosial yang beragam dari perempuan dalam menjaga serta mempertahankan kehidupan di sekitar jalur kereta bara tersebut. Mencatat pemahaman akan memori kolektif ini penting dalam konteks pelestarian warisan budaya dan sejarah Sumatera Barat. Menghadirkan perempuan, mengangkat suara perempuan, mengeksplorasi pengalaman mereka adalah kerja penting dalam upaya melahirkan pemahaman yang lebih adil dan inklusif sehingga terlihat bagaimana kontribusi nyata perempuan dalam membangun identitas sosial dan budaya di Sumatera Barat, khususnya di sekitar jalur kereta antara Sawahlunto dan Teluk Bayur, Padang.

³ Neuman, W. L. 2006. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*, Sixth Edition. Hal 44

Hasil dan Pembahasan

Suara-Suara Perempuan di Jalur Arang

Irda tahu hari itu ada pertemuan digelar orang di tengah pasar, Sabtu 18 November 2023. Hanya berjarak lima meter saja dari tempat dia berjualan, sebuah petak los di bekas stasiun persinggahan kereta *baro*, di Pasar Pitalah Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar. Acara itu bernama Festival dan seminar adat Galanggang Arang. Dia tidak menerima undangan karena dia megaku 'bukan siapa-siapa'. Pengakuan sebagai bukan siapa-siapa ini merupakan bahasa simbolik untuk menggambarkan bahwa dirinya tidak cukup berarti di mata publik. Dia bukan ninik mamak, bukan cerdik pandai juga bukan alim ulama. Ketiga komponen utama itulah yang mendapat tempat dan selalu diundang ke acara-acara penting sebagai representasi masyarakat Minangkabau, juga selaku orang yang dipercaya kaum. Ketiga unsur itu disebut; Tungku Tigo Sajarangan. Mereka semua laki-laki. Jadi kata bukan 'siapa-siapa', ketika diucapkan oleh seorang perempuan bisa dimaknai sebagai simbol dari orang yang terpinggirkan atau dalam istilah Spivak disebut sebagai subaltern. Ketika seseorang merasa dirinya bukan siapa-siapa dan tidak berarti atau bahkan tidak penting dalam sebuah sistem sosial maka ini mengindikasikan adanya peminggiran, pengkerdilan atau dalam bahasa Gramsci disebut dengan hegemoni kultural.

Antonio Gramsci memperkenalkan konsep hegemoni yang lebih luas dibanding relasi kuasa antar kelas seperti yang dipahami generasi Marxis sebelumnya. Bagi Gramsci, hegemoni adalah sarana kultural maupun ideologis tempat kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat, melestarikan dominasinya. Dominasi itu diperoleh dengan mengamankan "persetujuan spontan" kelompok-kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja, melalui penciptaan negosiasi konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok-kelompok dominan maupun yang didominasi.⁴ Spivak, yang pemikirannya juga *bersand* kepada Marxis, berusaha menarik pengertian hegemoni Gramsci ke wilayah yang lebih spesifik, yakni kelompok perempuan.

⁴ Strinati, Dominic (2010). *Popular Culture Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hlm. 254

Berdasarkan pengamatan lapangan saya sebagai peneliti, di berbagai rangkaian festival budaya, khususnya pada pagelaran Galanggang Arang, selain tungku tigo sajarangan, unsur lain yang sering diundang kepertemuan-pertemuan publik lainnya adalah bundo kanduang, sebagai representasi perempuan. Namun, seringkali kehadirannya hanya sebagai pelengkap. Kalau ada pesta, mereka diminta untuk datang *menjunjung jamba* (konsumsi acara) dengan menggunakan kostum khusus bundo kanduang.

Kegiatan Galanggang Arang yang saya amati di atas merupakan sebuah perayaan budaya untuk menggerakkan ekosistem kebudayaan di sepanjang Warisan Tambang Batu bara Ombilin Sawahlunto (WTBOS). Kegiatannya berlangsung cukup lama, dari pertengahan Oktober 2023 sampai Desember 2023, diselenggarakan di tujuh kabupaten sepanjang jalur WTBOS.⁵ Salah satu rangkaian acara pada kegiatan pembukaan Galanggang Arang yaitu pembacaan rumusan dialog warisan budaya oleh wakil nagari sepanjang jalur WTBOS yang merupakan perwakilan dari tujuh kabupaten kota daerah penyangga WTBOS. Karena posisi wali nagari juga didominasi oleh laki-laki maka di forum dialog itupun, lagi-lagi, kehadiran perempuan sangat tidak representatif. Suara perempuan 'hilang' dalam keterwakilan.

Didengar untuk Dilupakan

Pada kegiatan di forum dialog dengan niniak mamak dan bundo kanduang di pasar dan bekas Stasiun Pitalah, peserta dari unsur bundo kanduang cukup banyak hadir. Menurut Edy Utama, salah seorang kurator dalam Festival Galanggang Arang, justru perempuan yang banyak berkomentar pada saat itu. Namun, sayang sekali catatan dari komentar dan suara-suara perempuan itu tidak ditemukan.

"Sayang, tidak ada yang mencatat." Demikian pengakuan Edy Utama dalam wawancara dengan saya setelah selesai acara dialog. Edy Utama seorang kurator festival yang punya pengalaman lintas benua. Dia banyak melibatkan perempuan dalam *events* budaya yang dia kuratori.⁶ Pengakuan Edy dan kenyataan yang terjadi di lapangan bisa

⁵

<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/peresmian-kegiatan-galanggang-arang-anak-nagari-merayakan-warisan-dunia/>. Dilihat pada hari Selasa (28 November 2023)

⁶ Wawancara dengan Edy Utama, 19 November 2023.

diterjemahkan sebagai bentuk peminggiran yang lain, yaitu suara perempuan didengarkan dan dihadirkan, tetapi kemudian dilupakan karena tidak ada yang mencatatnya.

Irda jelas bukan bagian dari Tungku Tigo Sajarangan, dia juga bukan salah seorang dari bundo kanduang. Dia perempuan tua yang sudah puluhan tahun menjual lontong pical di lapak itu. Nama lapaknya, Katupek Pical Tek Ida. Lontong pical adalah satu dari sekian banyak makanan khas dari Pasar Pitalah. Umurnya sudah 72 tahun sekarang. Lontong pical Irda termasuk menu 'legend' karena dia merupakan generasi ketiga yang melanjutkan usaha neneknya berjualan pical di sana.

Walaupun bukan saksi utama, Namun Irda merupakan saksi yang masih tersisa tentang perjalanan kereta *baro* yang membawa batu bara dari Tambang Ombilian ke Gudang Silo di Teluk Bayur, Padang. Irda tentu juga mendengar cerita-cerita tentang konflik tanah yang terus diperbincangkan orang di kampungnya, turun temurun, semenjak usaha pemerintah kolonial membuka jalur jalan kereta api melewati kampungnya. Serta pembangunan Pasar Pitalah, tempat dia berjualan. Namun Irda, seperti juga kebanyakan perempuan lain, merasa persoalan negosiasi atau bahkan pergelutan hak penguasaan tanah itu bukan wilayah dia sebagai perempuan. "Itu urusan mamak kapalo waris atau ninik mamak serta penghulu yang sudah dipercaya." Urusan domestik Irda sudah sangat menyibukkannya. Mengurus 5 orang anak, cucu-cucu yang juga menumpang besar di bawah asuhannya, itu sangat menguras energi.⁷

Nita, pemilik Kedai Makan Nita, kedai makan paling terkenal dan 'legend' di Pasar Pitalah juga mengalami hal yang sama dengan Irda. Pada saat acara, dia harus menyiapkan pesanan makanan untuk para peserta. Walaupun, yang sedang dibicarakan adalah mengenai sejarah yang berkaitan dengan perjalanan hidupnya, tentang berbagai kisah tentang lahan yang digunakan untuk membangun infrastruktur kereta api berupa stasiun dan rel yang melintasi tanah milik kaumnya. Namun, kesibukan memasak dan mengawasi rumah makannya tidak memungkinkan dia duduk tenang mengikuti diskusi. Suami dan saudaranya saja yang mewakili bercerita bagaimana hak kepemilikan tanah

⁷ Wawancara langsung dengan Irda, 18 November 2023.

Nita kemudian beralih menjadi milik pemerintah kolonial dan kemudian menjadi milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Tidak hanya di bekas Stasiun Pitalah, di kawasan lain yang menjadi lajur lewatnya kereta baru seperti Padang Panjang, Kayu Tanam, Lubuk Alung, dan Tabing Padang, cerita-cerita dan pengakuan yang sama terdengar. Hampir sepakat, kaum perempuan telah mempercayakan persoalan berunding dan urusan tanah menjadi domainnya laki-laki yang menjadi representasi kaum. Kalau pun pada kenyatannya hasilnya mengecewakan, kaum perempuan juga tidak punya kekuatan untuk melawan struktur otoritas yang sudah terbentuk.

Yuyus (80 tahun), suami Marnis, bercerita bahwa mereka suami istri selalu sibuk dengan urusan bisnis berdagang nasi. Yuyus dalam adat dan di dalam kaum perempuan secara matrilineal, posisinya sebagai rang sumando (ipar). Karena tanahnya dipakai untuk pembangunan rel adalah milik Marnis, Yuyus tidak punya hak untuk turut campur. Laki-laki di persukuan Marnislah yang hadir di pertemuan dan bernegosiasi ketika infrastruktur berupa stasiun dan rel kereta akan dibangun. Untungnya, menurut pengakuan Yuyus, pihak niniak mamak dan penghulu di kaum istrinya punya pandangan yang baik tentang keluarga matrilinealnya. Salah satu hasil perjuangan mereka adalah penghapusan pajak bagi sertifikat tanah atas nama Rasidah (?) nenek Marnis yang tanahnya dipakai untuk pembangunan tersebut.⁸

Denzi, adalah salah seorang generasi terakhir yang masih melihat kereta api *baro* lewat di Pasar Pitalah. Dia cucu Irda. Umur nya 21 tahun. Baginya kereta *baro* dan jalur kereta api tak lebih dari hiburan sesaat yang melintas di mata dan menimbulkan bunyi di telinga. Dia tidak mengerti untuk apa kereta itu lewat, hendak kemana dan untuk apa batu bara itu dibawa pergi melewati kampungnya. Jangankan Denzi, Irda pun juga tak paham semua itu. Semenjak kecil dia hanya melihat anak-anak berdiri di samping stasiun ketika kereta berhenti menukar ‘gigi’, lalu berteriak; “Minta *baro* saganggam”⁹. Untuk apa bara-bara itu? Ya, untuk mainan dan dibuang-buang saja.

⁸ Wawancara dengan Yayus, 18 November 2023. Sayangnya sampai artikel ini ditulis belum ditemukan bentuk fisik perjanjian dan sertifikat tanah milik Rasidah tersebut. Tetapi menurut informasi dari salah seorang informan, bukti itu ada di kantor PJKA di Simpang Haru. Kemungkinan juga adai di kantor pengacara Miko Kamal, yang menjadi pengacara pihak PJKA.

⁹ Minta kami bara agak satu genggam (terjemahan minang)

Kalaupun kepentingan yang agak bersinggungan dengan intelektualitas mungkin hanya pengalaman Andis (50 tahun) dan kawan-kawannya. Andis seorang guru perempuan yang semenjak kecil sampai sekarang tinggal di dekat rel. Baginya kehadiran kereta *baro* sebagai penanda waktu juga menjadi alat belajar berhitung. Begitu kereta lewat, mereka beramai-ramai akan menghitung jumlah gerbongnya.

Pengalaman Warni (63) lain lagi. Tinggal di pinggir rel dan membangun rumah di sana serta keharusan membayar pajak tahunan sebagai sewa tanah ke PJKA merupakan keharusan yang harus dia patuhi. Walaupun, dia mendengar cerita bahwa tanah tersebut dulu merupakan tanah nenek moyangnya. Namun, dia tidak pernah tahu ada negosiasi yang memungkinkan tanah tersebut beralih kepemilikan.

Selain persoalan sejengkal dua jengkal tanah yang kemudian menjadi sehasta, lalu peralihan hak kepemilikannya yang tidak putus ceritanya diingatan banyak perempuan, kematian di sepanjang rel justru menjadi ingatan yang kuat membekas. Kisah tentang Des yang dilindas kereta ketika pulang mencuci di batang air atau Mar yang berlari menemui jasad suami dan anaknya yang sudah berserak, lalu dia coba memunguti serpihan daging yang terlindas besi kereta tersebut ke dalam kantong dasternya. Cerita yang sangat mudah diingat dan lekat dalam memori orang-orang. Namun, bagaimana kelanjutan nasib para korban, bagaimana dengan asuransi yang harusnya mereka terima dan bagaimana sistem pengamanan palang pintu di jalur-jalur rawan keramaian tidak pernah mampu mereka pikirkan. Para perempuan-perempuan yang saya wawancarai itu tidak mampu memikirkan semua hal yang sesungguhnya merupakan hak mereka. Hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan rasa aman dan hak untuk bebas dari rasa takut, sebagaimana termaktub dalam undang-undang.¹⁰

The Reality Without Name

Sebuah pengakuan menarik saya kutip dari tulisan AA Navis berjudul Sistem Matrilineal:

Setelah Minangkabau dikuasai oleh Belanda pada pertengahan abad 19, terutama setelah eksploitasi besar-besaran di bidang ekonomi pada akhir abad

¹⁰ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>. Dilihat pada hari Selasa 28/11/2023 pukul 10.56

itu, dengan membuka tambang batu bara dan jalur jalan kereta api dan pelabuhan samudra banyak lapangan kerja terbuka di kota-kota di sepanjang jalur jalan kereta api. Itu karena diperlukan tenaga kerja terdidik. Sekolah berbahasa Belanda dibuka di seluruh kota kabupaten. Lulusan sekolah berbahasa Belanda bergaji lebih tinggi. Kebijakan "etisch politiek" dengan program "westernisasi" menimbulkan banyak perubahan dalam pandangan hidup dan perilaku serta sikap budaya masyarakat. Antara lain: (a) Pola hidup mulai terlepas dari sistem ekonomi agraris yang komunalistik; (b) Orientasi budaya mengarah ke Barat yang patrilineal dan patriarkis.¹¹

Pemikiran Navis ini menggambarkan bagaimana dampak sosial yang dibawa oleh kolonial terhadap pembentukan masyarakat Minangkabau baru yang haluan berpikirnya bergeser dari sistem komunal menjadi individual.

Dalam sistem komunal matrilineal Minangkabau, yang menjadi *pusek jalo pagangan kunci* atau dalam bahasa lain yang menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam kaum adalah *mande sako* (perempuan). Hal ini berarti, suatu peristiwa akan menjadi sangat penting atau dianggap sebagai problem bersama di dalam komunitas jika peristiwa tersebut bersangkutan paut dengan kepentingan dan hajat hidup perempuan-perempuan di kaum tersebut. Persoalan laki-laki bukan isu yang penting. Laki-laki bisa sangat terhina jika dalam pembicaraan di ranah publik yang menjadi perjuangannya adalah kepentingan dirinya dan anak serta istrinya.

Sistem komunal seperti yang digambarkan di atas terus hidup karena secara ekonomi disokong oleh sistem agraris yang menjadi sumber penghidupan masyarakat komunal Minangkabau. Laki-laki tidak bisa lepas dari pusaran kekuasaan matrilinealnya karena tanah pusaka dan hasil ladang adalah milik kaum dan dikonsumsi secara bersama-sama. Bahkan ketika laki-laki telah menikah sekalipun, dia masih harus menjalankan pengabdianya terhadap perempuan, baik dalam kaumnya ; sebagai niniak mamak dan penghulu, maupun dalam kaum istrinya; sebagai sumando. Disebutkan

¹¹ Navis, AA.1999. Yang Berjalan Sepanjang Jalan, Grasindo, Jakarta. Hal 61.

dalam mamangan (adagium) adat; *anak dipangku kamanakan di bimbiang, urang kampung dipatenggangkan*.¹²

Namun zaman berganti. Gejolak sosial, politik, dan ekonomi mengguncang kehidupan dan tatanan sosial masyarakat. Gejolak yang kemudian juga membangun cara pandang baru dalam masyarakat. Laki-laki mulai dipaksa untuk berpikir lebih individual. Perempuan pun tak lagi bisa diharapkan sepenuhnya tinggal dalam komunalnya dan berperan sebagai *pusek jalo paganagan kunci*. Dalam pusaran perubahan itu dan dinamika hidup yang bergerak menjadi lebih materialistis dan individualis, perempuan justru menjalankan peran berganda-ganda. Dalam kaum sebagai penjaga pusaka, di keluarga sebagai ibu dan pengasuh dan juga penopang ekonomi keluarga. Tekanan-tekanan beban hidup itu membuat ketidakterwakilan suara mereka pada momen-momen adat justru menjadi pilihan yang terpaksa diterima. Kehadiran perempuan di dalam lingkaran kekuasaan Tungku Tigo Sajarangan justru dianggap bisa menyalahi adat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Tungku Tigo Sajarangan adalah tiga komponen utama yang memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan-persoalan dalam masyarakat. sebuah konsep yang merepresentasikan model relasi kuasa dalam mengambil kebijakan, tidak saja sebatas persoalan adat, tetapi dipakai juga dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan di Sumatera Barat. Ketiganya memiliki posisi setara. Mereka terdiri dari unsur; ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Ketiga unsur itu didominasi oleh laki-laki secara mutlak sedangkan perempuan ditempatkan pada ruang atau dimensi yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kenapa dalam dinamika sosial kemasyarakatan terutama dalam struktur kekuasaan di Minangkabau dalam pengambilan kebijakan, keterwakilan perempuan harus lewat laki-laki.

Konsep Tungku Tigo Sajarangan ini memang tidak terlepas dari falsafat adat dan norma yang berlaku di Masyarakat etnis Minangkabau yang mayoritas mendiami daerah Sumatera Barat ini, *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*. Tungku Tigo Sajarangan merupakan struktur kekuasaan dalam masyarakat yang disimbolkan

¹² Anak dipangku, keponakan dibimbing, orang kampung harus dijaga juga (terjemahan dari bahasa Minangkabau oleh peneliti)

pada tiga batu yang disebut tungku, terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Ketiga unsur inilah yang diberi otoritas oleh masyarakat untuk memutuskan persoalan-persoalan sosial. Karena masyarakat yang memiliki persoalan adalah masyarakat matrilineal maka biasanya persoalan yang dianggap besar dan mengancam tatanan sosial itu adalah persoalan perempuan berkaitan tanah pusaka dan kelangsungan sistem matrilineal dalam keluarga komunal perempuan. Menariknya dari tiga unsur pemegang otoritas tersebut posisi perempuan tidak jelas. Tiga tungku yang dimaksud senantiasa didominasi oleh kelamin laki-laki. Keadaan ini memunculkan pertanyaan, kenapa perempuan tidak hadir sebagai pemegang otoritas dalam menentukan keberlangsungan klan mereka? Kenapa keterwakilan perempuan ditiadakan dalam sistem? Konstruksi pemikiran seperti apa yang ada dalam masyarakat Minangkabau terhadap perempuan dalam hal menentukan nasib diri dan kaumnya? Bukankah masyarakat Minangkabau menyebut dirinya toleran, terbuka dan egaliter? Rangkaian pertanyaan ini terus mengganggu saya sepanjang proses penelitian.

Ternyata ada pembagian ruang sosial yang tegas antara laki-laki dan perempuan dalam alam pemikiran masyarakat Minangkabau yang mereka sebut dengan kedudukan. Setiap unsur memiliki kedudukannya masing-masing. Kemudian, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis setiap unsur harus menjalankan kedudukan atau wewenangnya masing-masing. Setiap orang harus memakai pakaiannya sendiri-sendiri, niniak mamak dianggap tidak punya kewenangan memutuskan hal-hal berkaitan dengan tugas alim ulama demikian juga sebaliknya. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang dihadirkan untuk melengkapi ketiga komponen pemilik otoritas ini posisinya juga dibedakan, mereka tidak punya kewenangan untuk memutuskan tetapi sekedar untuk diminta saran dan pandangan dan unsur pelengkap ini kemudian dinamakan dengan bundo kanduang. Secara kedudukan, bundo kanduang berbeda ruang dengan tiga unsur lainnya itu. Jadi, dalam sebuah perundingan atau musyawarah, bundo kanduang tidak dihadirkan fisiknya, tetapi hanya diminta saran dan masukannya. Ibarat, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis perwakilan rakyat. MPR inilah yang disebut tungku tigo sajarangan dan rakyatnya yang disebut pemegang kedaulatan itu adalah kaum perempuan. Kenapa perempuan tidak dibenarkan mewakili dirinya sendiri? Apakah tidak ada perempuan Minang yang cerdik dan pandai? yang alim dan ulama dan yang arif dan punya

pengetahuan adat seperti ninik mamak? Menurut Ketua Bundo Kanduang, Profesor Raudha Thaib, logika berpikir dalam melihat kedudukan dan posisi perempuan harus dengan perspektif yang sama. Kekuasaan perempuan dalam sistem matrilineal itu diibaratkan sebagai *owner* atau komisaris pada sebuah perusahaan dan laki-laki adalah manajerial. Jadi, perempuan tidak perlu sibuk mengurus hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi urusan laki-laki yang penting perempuan mendapat laporan dari apa yang sudah dilakukan oleh tim manajerial (laki-laki) dalam kaum.¹³

Realitas tentang perempuan Minangkabau, posisi dan kedudukannya, seperti yang dikatakan oleh Raudha berbeda jika dimaknai dengan menggunakan konsep subaltern yang diperkenalkan Spivak atau Gramsci. Kalau Spivak menganggapnya sebagai bentuk hegemoni dan ketertindasan perempuan. Namun, justru Raudha mengakuinya sebagai kesadaran akan pembagian kerja yang 'alamiah' dan memuliakan perempuan. Sesuatu yang mengingatkan kita kepada konsep kemuliaan Tuhan yang digambarkan oleh Martin Lings sebagai *The Reality Without Name*.¹⁴

Teori tentang *The Reality Without Name* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Martin Lings, seorang penulis, sejarawan, dan ahli spiritualisme Islam. Konsep ini sebagian besar terkait dengan pemahaman Lings tentang keesaan atau realitas mutlak yang tidak terikat pada nama atau konsep yang dapat dipahami oleh manusia atau yang disebut dengan realitas transenden. Dalam hal ini, sebenarnya Lings berfokus pada gagasan bahwa realitas mutlak atau keesaan yang dimengertikan dalam ajaran sufi atau mistisisme Islam melebihi kata-kata atau pemikiran konvensional manusia. Realitas ini tidak bisa direduksi menjadi konsep atau nama tertentu karena sifatnya yang melampaui pemahaman manusia yang terbatas. Bagi Raudha, perempuan dalam sistem adat Minangkabau seolah juga ditempatkan dalam realitas transedental seperti ini.

Konsep tentang transedental dan realitas tak bernama ini menyoroti keterbatasan bahasa dan pemahaman manusia dalam mencapai pemahaman penuh tentang realitas absolut. Lings meyakini bahwa bahasa dan konsep-konsep manusia terbatas dan tidak bisa sepenuhnya menggambarkan realitas transenden tersebut. Karena keterbatasan ini kemudian Lings menekankan pentingnya pencarian spiritual dan pengalaman intuitif

¹³ Wawancara dengan Prof. Raudhah Taib, 18 Juli 2022.

¹⁴ Lings, Martin. 1975. *What is Sufism*. University of California Press. California.

sebagai sarana untuk mencapai pemahaman tentang realitas tanpa nama ini. Dia berpendapat bahwa pengalaman spiritual lebih dekat dengan esensi keberadaan daripada kata-kata atau konsep-konsep manusia.

Teori ini merupakan upaya Lings untuk menyoroti keterbatasan kata-kata dan pemikiran konvensional dalam memahami realitas mutlak atau Tuhan. Penting untuk dicatat bahwa konsep "The Reality Without Name" atau realitas tanpa nama ini terutama ditemukan dalam karya-karya Martin Lings yang terinspirasi oleh pemikiran sufi dan dimensi spiritual Islam sehingga lebih bersifat filosofis dan spiritual daripada konsep yang bisa disertakan dalam lingkup ilmiah konvensional, apa lagi ketika ditarik kewilayah kultural untuk melihat kedudukan perempuan dalam sistem adat.

Meskipun konsep yang diperkenalkan Lings ini memiliki keunikan dalam menekankan pentingnya pengalaman spiritual dan kemungkinan adanya realitas yang tak dipahami oleh manusia. Namun, gagasan ini cenderung bersifat subjektif dan sulit untuk diverifikasi secara ilmiah. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Raudha tentang posisi perempuan dalam adat.

Penutup

Dalam sistem matrilineal, sebuah sistem sosial yang hidup dalam masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, menempatkan perempuan sebagai pemilik tanah pusaka. Artinya kepemilikan warisan (*pusako tinggi*) diurutkan dari ibu ke anak perempuan atau berdasarkan ranji garis keturunan perempuan. Pada tahun 1872, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka jalur kereta api *baro* dari Sawahlunto menuju Teluk Bayur. Proses pembangunan ini, menempuh tanah-tanah milik kaum perempuan. Namun, dalam proses pembangunan dan negosiasi-negosiasi pengelolaan aset tanah, peran perempuan tidak signifikan. Kehadiran perempuan cenderung diwakilkan pada pemegang otoritas adat yang disebut Tali Tigo Sapilin dan Tungku Tigo Sajaringan.

Sistem perwakilan dalam adat melalui tungku tigo sajaringan ini membuat perempuan terpinggirkan dari sejarah karena kisahnya tidak benar-benar dianggap penting. Hasil eksplorasi terhadap pandangan dan imajinasi yang tersisa dalam pikiran kaum perempuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi dominasi oleh laki-laki (niniak mamak) terhadap perempuan di ruang negosiasi. Dominasi ini

dimungkinkan karena perempuan mewakilkan (representasi) suaranya dalam berunding dan memutuskan satu perkara kepada laki-laki dengan harapan laki-laki akan membela kepentingan mereka. Di sisi lain, laki-laki juga dihadapkan pada pandangan dunia (*world view*) baru yang lebih individual diperkenalkan oleh kaum kolonial sehingga mereka tidak lagi bisa sepenuhnya menegakkan kepentingan kaumnya. Namun demikian, perempuan tidak bisa menolak peminggiran yang terjadi dengan alasan kemurnian adat dan anggapan bahwa sistem adat yang berlaku adalah sebuah kebenaran mutlak.

Daftar Kepustakaan

- Lings, Martin. 1975. *What is Sufism*. University of California Press. California.
- Navis, AA. 1999. *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*, Grasindo, Jakarta.
- Neuman, W. L. 2006. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*, Sixth Edition. Sage. CA.
- Riach, Graham K. 2017. *An Analysis of Gayatri Chakravorty Spivak's: Can The Subaltern Speak?* Routledge. London.
- Strinati, Dominic (2010). *Popular Culture Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suryawati, Indah (dkk), 2018. *Third World Subaltern Women in the Review of Feminism Theory Postcolonial Gayatri Chakravorty Spivak*.
<https://journal.neolectura.com/index.php/focus/article/view/336/251>
<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/peresmian-kegiatan-galanggang-arang-anak-nagari-merayakan-warisan-dunia/>. Dilihat pada hari Selasa (28 November 2023)
<https://journal.neolectura.com/index.php/focus/article/view/336/251>
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2>
- Wawancara dengan Edy Utama, 19 November 2023.
- Wawancara dengan Prof. Raudhah Taib, 18 Juli 2022.
- Wawancara dengan Yayus, 18 November 2023
- Wawancara dengan Irda, 18 November 2023.
- .